Jurnal Darma Agung
Volume: 33, Nomor: 2, (2025), April: 21 - 30
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v33i2.5677

P-ISSN:0852-7296
E-ISSN:2654-3915

PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HKM DAN HTR DI KABUPATEN SAROLANGUN

Ade Ayu Apriani [1], Marwoto [2], Hutwan Syarifuddin [3]
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi
e-mail: adeayuapriani1@gmail.com

ABSTRAK

Pada wilayah Hilir Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa skema perhutanan sosial, dalam pengelolaannya tidak luput dari peran gender yaitu laki-laki dan Perempuan. Pada penelitian ini dilakukan pada2 (Dua) Lokasi berbeda dengan skema HKm dan Skema HTR, lokasi 1 (Satu) berada di Desa Taman Dewa dan Desa Kute Jaye Kecamatan Mandiangin sebagai lokasi HKm Sri Bado, lokasi 2 (Dua) berada di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan sebagai lokasi HTR. Penelitian ini berfokus pada peran laki-laki dan Perempuan dalam mengelola kedua skema diatas berdasarkan presentase curahan waktu kerja pada pengelolaah HKm dengan presentase 55,12% untuk laki-laki dan Perempuan 44,79% pertahun, untuk pengelolaan HTR dengan presentase 68,75% untuk laki-laki dan Perempuan 31,25%. Presentase tersebut berdasarkan keseluruhan curahan waktu laki-laki dan Perempuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata Kunci: Perhutanan sosial, Gender, HKm, HTR

ABSTRACT

In the downstream area of Sarolangun Regency there are several social forestry schemes, the management of which does not escape gender roles, namely men and women. This research was carried out at 2 (Two) different locations with the HKm scheme and the HTR Scheme, location 1 (One) was in Taman Dewa Village and Kute Jaye Village, Mandiangin District as the location of HKm Sri Bado, location 2 (Two) was in Lubuk Sepuh Village, District Pelawan as the HTR location. This research focuses on the role of men and women in managing the two schemes above based on the percentage of working time spent on managing HKm with a percentage of 55.12% for men and women 44.79% per year, for managing HTR with a percentage of 68.75% for men and women 31.25%. This percentage is based on the total time spent by men and women in planning, organizing, implementing and evaluating.

Keywords: Social forestry, Gender, HKm, HTR

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyrakat yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan dan upaya untuk melestarikan hutan dengan cara memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengelolaan hutan tidak luput dari peran gender yaitu laki-laki dan perempuan dalam implementasinya. Gender merupakan konsep untuk menjadi acuan pada peran dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan baik dari sisi

History:
Received : 25 November 2024
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 07 April 2025
Published : 14 April 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

sosial dan budaya, dengan demikian gender mengacu pada peran laki-laki dan perempuan dalam pembagian hak, peran dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari (Qomariah, 2019). Pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada bagian wilayah hilir sarolangun mendapatkan izin konsesi kawasan pengelolaan peehutanan sosial seluas 77.116,62 Ha (RPHJP KHPHP UNIT VIII HILIR 2018). Pengelolaan hutan dalam implementasinya cendrung menjadi areal yang didominasi oleh laki-laki saja namun seiring berkembangnya zaman dan modernisasi dalam upaya penyetaraan gender berdasarkan SDGS pilar ke 5 (Lima) tentang kesetaraan gender mengupayakan agar peran wanita dalam melakukan segala hal ditingkatkan. Laki-laki dan perempuan melakukan peran yang berbeda dalam mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan tanaman rakyat (HTR), pada penelitian yang melibatkan laki-laki dan perempuan ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi pengelolaan perhutanan sosial berbasis gender dengan dua skema yaitu skema hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan tanaman rakyat (HTR).

Sehingga pada penelitian ini di fokuskan untuk melihat bagaimana curahan waktu laki-laki dan perempuan dalam mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang terbagi kedalam 4 (Empat) aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

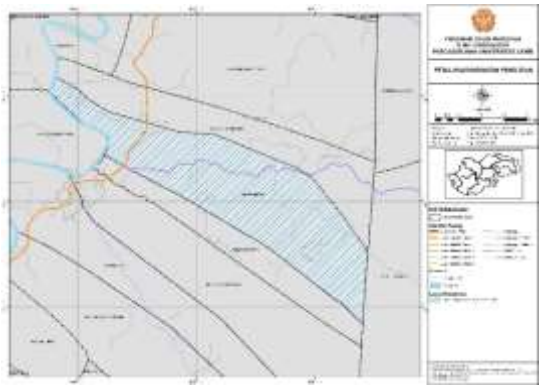

Gambar Lokasi Penelitian 1 HKm

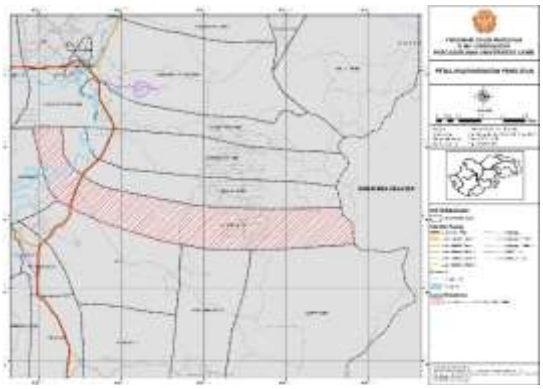

Gambar lokasi penelitian 2 HTR

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu Hutan Kemasyarakatan Sri Bado yang terletak di Desa Taman Dewa dan Desa Kute Jaye Kecamatan Mandiangin kemudian Hutan Tanaman Rakyat Koperasi Raga Bhakti Makmur yang terletak di Desa Lubik Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

Metode Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuisioner. Jenis data primer berupa jawaban pada pertanyaan yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai peran gender dalam mengelola hutan tanaman rakyat (HKm) Sri Bado dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Raga Bhakti Makmur.

Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud berupa peta lokasi, profil desa, jumlah penduduk, dan kondisi geografis.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan disajikan kedalam bentuk tabel yang berisi presentase curahan waktu laki-laki dan perempuan dalam mengelola perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan (HKm) dan Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menggunakan rentang kriteria presentase sebagai berikut:

$$\%Qt = \frac{\sum Qt}{\sum Qp} \times 100\%$$

Keterangan:

%Qt: Persentase waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)
∑Qt : Jumlah waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (jam/tahun)
∑Qp: Jumlah waktu total yang digunakan laki-laki dan perempuan (Diniyati dan Achmad, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usia, Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan,

Responden yang diwawancarai merupakan anggota kelompok laki-laki dan perempuan yang ikut serta dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HKm) Sri Bado dan Hutan Tanaman Rakyat Koperasi (HTR) Raga Bhakti Makmur

Tabel 1. Usia Responden

Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)

20-30	3	9,37
31-39	8	25
40-49	16	50
50-65	5	15,62
TOTAL	32	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Usia responden pada penelitian ini secara keseluruhan produktif berdasarkan rentang usia yang digunakan oleh BPS dan sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah penduduk yang berada pada rentangan usia 15-64 tahun sedangkan untuk usia non produktif berada pada rentan usia < 14 tahun dan >65 tahun. Responden lebih dominan pada usia 40-49 tahun dengan presentase 50% dimana usia tersebut termasuk kategori usia yang sudah memiliki banyak pengalaman dimana responden yang menjadi anggota tentunya memiliki wawasan dari pengalaman serta memiliki tanggung jawab yang tinggi.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dimulai dari tingkatan tidak sekolah, SD, SMP, SMA, DIV, dan S1.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Tidak Sekolah	1	3,12
SD	3	9,73
SMP	11	34,37
Perguruan Tinggi	1	3,12
TOTAL	**32**	**100**

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

pada kategori tingkat pendidikan responden yang tidak menempuh pendidikan formal berjumlah 1 orang dengan presentase 3,12%, responden yang menempuh pendidikan sekolah dasar berjumlah 3 orang dengan presentase 9,37%, responden

yang menempuh pendidikan SMP berjumlah 11 orang dengan presentase 34,37%. Penyebab responden tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala aksebilitas, tidak tersedianya sekolah formal pada desa tempat tinggal responden dan ekonomi. Responden yang menempuh pendidikan SMA berjumlah 16 orang dengan presentase 50% yang menjadi jumlah dan presentase tertinggi pada karakteristik tingkat pendidikan hal ini terjadi karena responden melanjutkan sekolah ke ibukota kabupaten dan ibukota provinsi untuk melanjutkan pendidikan. Responden yang menempuh pendidikan tertinggi dengan jumlah 1 orang dengan presentase 3,12%. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga tingkat produktivitas atau kinerja tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga tingkat produktivitas atau kinerja tenaga kerja tersebut. Pada umumnya orang yang mempunyai Pendidikan formal maupun informal yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas. Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas, akan mendorong tenaga kerja yang bersangkutan melakukan Tindakan yang produktif (Resmiati, 2018).

3. Jenis pekerjaan

Tabel 3 Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Lainnya	5	15,62
Buruh Tani	12	37,5
Petani	13	40,62
Pedagang	2	6,25
TOTAL	32	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

pada kategori jenis pekerjaan merupakan karakteristik responden mengenai jenis pekerjaan, responden yang berprofesi sebagai petani berjumlah 13 orang dengan presentase 40,62% sebagai prsentase tertinggi, responden dengan profesi buruh tani berjumlah 12 orang dengan presentase 37,5% buruh tani merupakan orang yang menggarap atau bekerja di kebun milik orang lain untuk mendapatkan upah. Responden dengan jenis pekerjaan lainnya masuk dalam kategori PNS, honor dan swasta berjumlah 5 orang dengan presentase 15,62% sedangkan responden yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 2 orang dengan presentase 6,25%.

4. Peran Gender Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema HKm

Tabel 4. Kegiatan HKm

Jenis kegiatan	Laki-laki	perempuan
perencanaan	55,56%	44,44%
pengorganisasian	68,75%	31,25%
Pelaksanaan	50%	50%
Evaluasi	60%	40%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Hutan kemasyarakatan (HKm) KTH Sri Bado yang berada di Desa Taman Dewa dan Desa Kute Jaye Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Kegiatan pada areal Hutan kemasyarakatan Sri Bado dilakukan secara keseluruhan kurang lebih 16 kali dalam satu bulan selama 6 jam/hari jika dihitung dalam 12 bulan maka laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan pada Hutan Kemasyarakatan selama 1.152 jam/tahun Luasan total kemasyarakatan sri bado yaitu 608 Ha, jika dibagi dengan jumlah anggota maka masing-masing anggota mendapatkan hak kelola 12 Ha. Pada tabel 4.10 alokasi waktu kerja secara keseluruhan yang dilakukan oleh anggota laki-laki dengan presentase 55,12% atau 636 jam/tahun sedangkan anggota perempuan dengan presentase 44,79% atau 516 jam/tahun. Perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan memiliki tujuan untuk mensejaterahkan baik anggota laki-laki serta anggota perempuan dan hutan tetap lestari dengan sistem yang sesuai dengan aspek yang ada pada perhutanan sosial. Untuk mencapai tujuan yang sama diyakini antar anggota laki-laki dan perempuan saling bahu membahu memberikan kontribusi dalam kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Adapun aspek perencanaan HKm sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja usaha
2. Melakukan inventarisasi areal kerja untuk menhetahui potensi kawasan
3. Koordinasi dengan pemerintah setempat yang memfasilitasi, untuk hutan kemasyarakatan sri bado difasilitasi oleh KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANGUN
4. Partisipasi dalam perencanaan dengan melakukan diskusi dan pengambilan keputusan.
5. Membuat kelembagaan kelompok yang didalamnya berisi struktur, aturan, kapasitas, lembaga hutan kemasyarakatan Sri Bado

Adapun kegiatan pada aspek pengorganisasian HKm sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya
2. Koordinasi dan komunikasi
3. Monitoring
4. Penyuluhan HKm
5. Manajemen administrasi

Adapun kegiatan pada aspek pelaksanaan sebagai berikut:

1. Persiapan lahan didalamnya termasuk pembuatan lubang tanam
2. Penanaman
3. Pemupukan tanaman
4. Melakukan penyulaman dan pembuatan piringan tanaman yang berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan pupuk agar pupuk yang diserap efisien
5. Melakukan penyiangan 2-3 kali dalam satu bulan atau disesuaikan dengan kondisi lahan

Adapun kegiatan dalam aspek evaluasi:

1. Melakukan analisa dalam target pencapaian rencana kerja
2. Pembuatan laporan kerja yang kemudian akan dievaluasi oleh anggota dan pendamping untuk rekomendasi implementasi pada rencana kerja selanjutnya

5.Peran Gender Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema HTR

Tabel 5 kegiatan HTR

Jenis kegiatan	Laki-laki	perempuan
Perencanaan	75%	25%
Pengorganisasian	62,5%	37,5%
Pelaksanaan	66,67%	33,33%
Evaluasi	70%	30%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Luasan wilayah kelola hutan tanaman rakyat Koperasi Raga Bhakti Makmur Seluas 456 Ha berada di Desa Lubuk Sepuh, Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan luasan dan jumlah anggota masing-masing anggota laki-laki dan perempuan mendapatkan hak kelola kawasan seluas 3 Ha. Presentase alokasi waktu kerja laki-laki dan perempuan pada hutan tanaman rakyat koperasi raga bhakti makmur 576 jam/tahun dengan presentase laki-laki 68,7% atau 396 jam/tahun dan presentase alokasi waktu kerja pada anggota perempuan 31,25% atau 180 jam/tahun. Terdapat perbedaan waktu kerja yang signifikan dengan dua skema perhutanan sosial, jika dibandingkan skema perhutanan sosial hutan kemasyarakatan curahahan waktu kerja lebih di tinggi dibandingkan skema hutan tanaman rakyat. Hal ini dikarenakan skema hutan tanaman rakyat menggunakan pola kemitraan. Adapun kegiatan pada aspek perencanaan HTR:

1. Membentuk kerja sama anggota kelompok tani dan pihak mitra hasil akhirnya berupa kesepakatan kerja

2. Membuat rencana kerja yang tepat dimulai dari identifikasi lahan,pemilihan jenis tanaman, perlakuan pada lahan karena hutan tanaman rakyat Koperasi Raga Bhakti Makmur berada pada kawasan hutan produksi yang cukup kritis karena hutan tanaman industry (HTI) PT.SAMHUTANI sejak tahun 1999-2014
3. Menetukan rencana jenis produk yang dihasilkan sesuai pasar di wilayah kelola Hutan Tanaman Rakyat baik dari segi jenis produk kayu pertukangan, pulp, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Adapun kegiatan dalam aspek pengorganisasian HTR:

1. Pelaksanaann dalam pembangunan hutan tanaman rakyat harus dilakukan secara partisipatif dengan seluruh instansi terlibat.
2. Anggota hutan tanaman rakyat melakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan didampingi oleh pihak KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
3. pertemuan anggota dan pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan

Adapun kegiatan dalam aspek perencanaan HTR:

1. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan
2. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin
3. Membuat areal pembibitan, penyiapan areal tanam , pemupukan. Penyulaman, penyiangan, dan pengayaan tanaman

Adapun kegiatan pada aspek evaluasi HTR:

1. Melakukan analisa dalam target pencapaian rencana kerja
2. Pembuatan laporan kerja yang kemudian akan dievaluasi oleh anggota dan pendamping untuk rekomendasi implementasi pada rencana kerja selanjutnya
3. 3. Melaksanakan diskusi bersama mitra dan pihak KPHP yang memfasilitasi untuk menilai hasil kinerja. Mengingat pola yang digunakan merupakan pola kemitraan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Alokasi curahan waktu tertinggi cendrung tinggi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan presentase 55,12% untuk laki-laki dan perempuan

44,79% atau setara dengan 1.152 jam/tahun curahan waktu kerja gender hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, untuk curahan waktu pada hutan tanaman rakyat cendrung lebih sedikit mencurahkan waktu karena menggunakan pola kemitraan dengan presentase anggota laki-laki 68,7% dan anggota perempuan 31,25 % atau setara dengan 576jam/ tahun.

2. Pada hutan kemasyarakatan peran laki-laki dan perempuan cendrung lebih aktif karena seluruh anggota laki-laki dan perempuan terlibat mulai dari perencanaan sampai pada kegiatan evaluasi, pada hutan tanaman rakyat lebih cendrung curahan waktu anggota laki-laki karena anggota perempuan lebih berfokus pada kegiatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena sudah ada yang bertanggung jawab pada areal penanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ariawan K, Raden Mohamad Mulyadin, Surati. (2016). Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan: Kasus Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 13 No. 1 April 2016, Hal. 13-23

Afri Awang, S., Andayani, W., Suryanto, (2018). Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, B., Perintis Kemerdekaan, J. K., Ilmu Kehutanan, J., Penelitian, H., & masuk, N. (n.d.). Characteristic of Farmer and Contribution of Community Forestry to Farmer's Income in Kulon Progo Riwayat naskah. https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt

Al-Farisi, M.R dan S. Komariah. 2022. Peran gender dalam sistem perkebunan (Studi Kasus Desa Sri Gunung, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan). Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan.9(2):28-36.

Asysyifa., Fonny, R. dan Yuniarti. 2018. Studi peran wanita perdesaan hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa telaga langsat kabupaten tanah laut. J. Hutan Tropis. 1(2): 98-105.

Aprilianti, D.,Nugraha,Y.,Sofyan,S.F.(2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengurustamaan Gender. 6(1): 187-190.

Arkaniyati. (2012). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Usahatani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor

Badan Pusat Statistik Kota Jambi, (2023), Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023. Jambi : BPS

Diniyati, D. dan B. Achmad. 2014. Kontribusi pendapatan hasil hutan bukan kayu pada usaha hutan rakyat pola agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Kehutanan. 9(1): 23-31.

Fakih, M. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Fauzi. (2020). Evaluasi Pascapelatihan pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2019 (Post Training Evaluation of Forest Farmer Group of Having Social Forestry License in West Java and Central Java in 2019). Agrokreatif, 6(3).

Gunawan, H. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut Potential Implementation of Social Forestry in Engaging Community Participation in Restoring Peatlands HASIL PENELITIAN. In Jurnal Ilmu Kehutanan (Vol. 13). https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt

Hamid, A. W. S., Sumarti, T., & Indriana, H. (2020). Hubungan Partisipasin Perempuan dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dengan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(2), 235–248.

Hafizianor, Rina Muhayah N.P, & Siti Zakiah. 2015. Analisis Gender Dalam Pengelolaan Agroforestri Dukuh Dan Kontribusinya Terhadap PendapatanRumah Tangga Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2

Kementerian, K., Perempuan, P., Perlindungan, D., Dengan Badan, A., & Statistik, P.(2012). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012.

Kholifah, U.N., Wulandari, C., Santoso, T., Kaskoyo, H. 2017. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Jurnal Sylva Lestari. 5(3): 39- 47

Maryati.2015. Ringkasan Panduan Perencanaan Yang Responsif Gender (PPRG) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup. Jurnal kajian ilmiah UBJ (Vol. 15).

Molla B. 2019. The role of agroforestery on house hold income of rural communities the ase Soddo Zuria Woreda; South Ehiopia. Glob J Human-Social Sci Res. 19(3):38–48

Mulyana, L., Febryano, I. G., Safe'i, R. dan Banuwa, I. S. 2018. Performa pengelolaan agroforestri di wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung rajabasa. J. Hutan Tropis. 5(2): 127-133.

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016Kota Jambi.

Qoriah, S. N. dan Sumart, T. 2008. Analisis gender dalam desa mandiri pangan (studi kasus: desa jambakan, kecamatan bayat, klaten-jawa tengah).J. Sodality. 2(1):209-234.

RPHJP KHPHP UNIT VIII HILIR 2018

Resmiati, N,H. 2018. Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuanmenikah Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Vol 2 (1).